

**MENYONGSONG KURIKULUM
PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN
TAHUN 2013
UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

SAMSURI
E-mail: samsuri@uny.ac.id

**JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
MGMP PKN SMA KABUPATEN KULONPROGO, 14 MEI 2013**

Pada awalnya....

- ❑ Pencapaian tujuan pembentukan warga negara yang baik dalam sistem pendidikan nasional kental dipengaruhi oleh suasana politik.
- ❑ Tiap-tiap rezim politik memiliki iktikad untuk mengaktualisasikan Pancasila dalam segenap kehidupan berbangsa dan bernegara.
- ❑ Pancasila rentan ditafsirkan untuk kepentingan masing-masing periode rezim.
- ❑ Kegelisahan umum terhadap kajian Pancasila yang “terbatas” dalam standar isi (2006) mata pelajaran PKn.

“KELUHAN” PKN PERSEKOLAHAN DI INDONESIA

- ❑ Standar Isi PKN (2006) dinilai “Kering” dengan kajian Pancasila.
- ❑ Pancasila salah satu dari delapan materi pokok PKN
- ❑ Kondisi saat ini (kenakalan remaja, korupsi) → menyalahkan “ketiadaan “NILAI-NILAI MORAL PANCASILA MODEL P4 dalam PKN sekarang.
- ❑ Pembelajaran PKN masih hapalan dan kesulitan menerjemahkan SK dan KD (temuan di beberapa forum seperti PLPG SD Rayon 111 UNY) .

Perkembangan Tema PKn di Asia Pasifik

- ▣ Negara-negara Asia ditandai oleh modernitas ganda yang memberikan kekayaan dan konteks yang kompleks bagi perkembangan pendidikan kewarganegaraan.
- ▣ Pendidikan kewarganegaraan Asia lebih ditandai oleh konsepsi-konsepsi kebajikan moral dan nilai-nilai personal daripada nilai-nilai publik dan kewargaan.
- ▣ Masyarakat kewargaan (*civil society*) disusun secara berbeda di Barat dan di negara-negara Asia, namun tak pernah dapat memainkan peran penting.
- ▣ Negara-bangsa menjalankan peran yang sama antara di negara-negara Asia dan Barat berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan.
- ▣ Ada semacam ketegangan antara pendidikan kewarganegaraan, mata-mata pelajaran sekolah, dan kurikulum akademik.
- ▣ Para guru menjadi pemain penting ketika ia hadir untuk mengimplementasikan pendidikan kewarganegaraan di sekolah.
- ▣ Organisasi kesiswaan dalam menanggapi pendidikan kewarganegaraan perlu dilakukan dalam menentukan pertimbangan (Kennedy & Fairbrother dalam Samsuri, 2012: 50).

Ragam Pengorganisasian Kurikulum PKN

Sektor	PRINSIP PENGORGANISASIAN			
PRIMER	WAJIB atau PILIHAN			
SEKUNDER	MATA PELAJARAN TUNGGAL/ WAJIB (Civics/Civic Education/ Citizenship Education)	TERINTEGRASI DENGAN MATA PELAJARAN LAIN (MISAL: SEJARAH, GEOGRAFI, SOCIAL STUDIES)	TERINTEGRASI LINTAS MATA PELAJARAN	KEGIATAN EKSTRA KURIKULER

(Kennedy, 2009:8; Kerr, 1999:15)

Ragam Nomenklatur Pendidikan Kewarganegaraan dalam Sistem Pendidikan Nasional

SEBELUM
ORDE
BARU

KEWARGANEGARAAN (1957),
CIVICS (1961)
KEWARGAAN NEGARA (1962)

MASYARAKAT
SOSIALIS
INDONESIA →
PANCASILA

SELAMA
ORDE
BARU

PENDIDIKAN KEWARGAAN NEGARA (1968)
PENDIDIKAN MORAL PANCASILA, (1973, 1975,
1984) PENDIDIKAN SEJARAH PERJUANGAN
BANGSA, PENDIDIKAN PENDAHULUAN BELA
NEGARA, PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (1994), PENDIDIKAN P4
→ DERIVASI PENDIDIKAN PANCASILA

MANUSIA
INDONESIA
SEUTUHNYA →
BERMORAL
PANCASILA → P4
sbg deskriptor *Civic
Virtues*

SETELAH
ORDE
BARU

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN (KBK
2004, STANDAR ISI 2006)

PENDIDIKAN PANCASILA DAN
KEWARGANEGARAAN (VERSI RANCANGAN
PENGEMBANGAN KURIKULUM 2013)

PANCASILA

PANCASILA dan
PILAR-PILAR
KEBANGSAAN

KURIKULUM 2013 ?

Membaca ulang

Sosialisasi Kurikulum 2013

versi 16 Maret 2013

di UPI Bandung

Pola Pikir KBK 2004



Pola Pikir KTSP 2006



Pola Pikir Kurikulum 2013



(Sumber: Kemdikbud, 2013)

Pola Pikir KBK 2004 dan KTSP 2006



(Sumber: Kemdikbud, 2013)

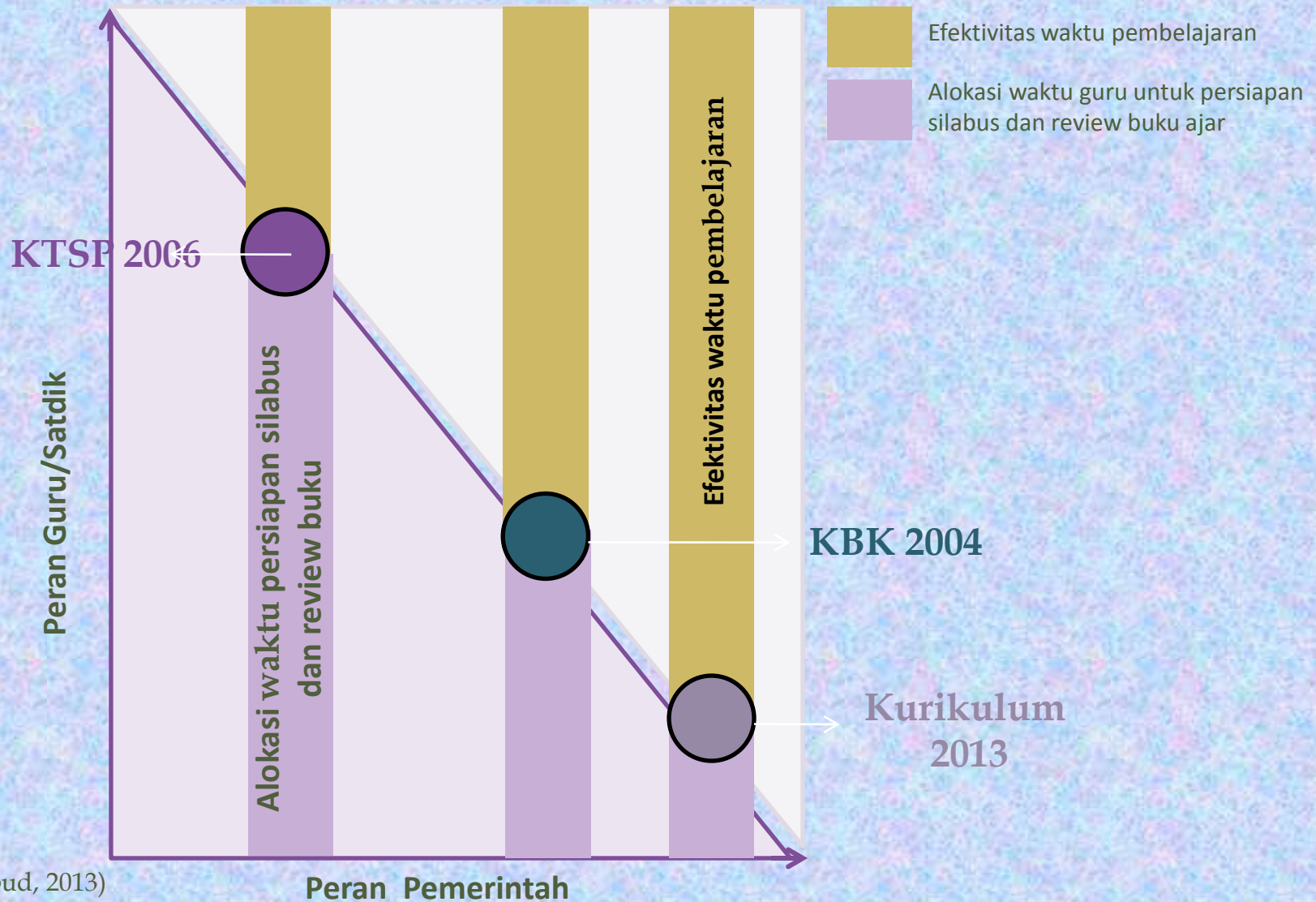
Pola Pikir Kurikulum 2013

Kemeja Lengan Panjang Warna Biru
Ukuran M (Bahu: 38 cm; Dada: 92 cm; Pinggang 86 cm; Panjang 83 cm; Lengan 58 cm)



(Sumber: Kemdikbud, 2013)

Pembagian peran Pemerintah dan Satuan Pendidikan/Guru dalam Kurikulum dan Efektivitas Waktu Pembelajaran



... Kurikulum 2013 memberikan kesempatan yang lebih besar bagi guru/satuan pendidikan untuk meningkatkan efektivitas waktu pembelajaran

Perbandingan Tata Kelola Pelaksanaan Kurikulum

Elemen	Ukuran Tata kelola	KTSP 2006	Kurikulum 2013
Guru	Kewenangan	Hampir mutlak	Terbatas
	Kompetensi	Harus tinggi	Sebaiknya tinggi. Bagi yang rendah masih terbantu dengan adanya buku
	Beban	Berat	Ringan
	Efektivitas waktu untuk kegiatan pembelajaran	Rendah [banyak waktu untuk persiapan]	Tinggi
Buku	Peran penerbit	Besar	Kecil
	Variasi materi dan proses	Tinggi	Rendah
	Variasi harga/beban siswa	Tinggi	Rendah
Siswa	Hasil pembelajaran	Tergantung sepenuhnya pada guru	Tidak sepenuhnya tergantung guru, tetapi juga buku yang disediakan pemerintah
Pemantauan	Titik Penyimpangan	Banyak	Sedikit
	Besar Penyimpangan	Tinggi	Rendah
	Pengawasan	Sulit, hampir tidak mungkin	Mudah

(Sumber: Kemdikbud, 2013)

Perbandingan Tata Kelola Pelaksanaan Kurikulum

Proses	Peran	KTSP 2006	Kurikulum 2013
Penyusunan Silabus	Guru	Hampir mutlak [dibatasi hanya oleh SK-KD]	Pengembangan dari yang sudah disiapkan
	Pemerintah	Hanya sampai SK-KD	Mutlak
	Pemerintah Daerah	Supervisi penyusunan	Supervisi pelaksanaan
Penyediaan Buku	Penerbit	Kuat	Lemah
	Guru	Hampir mutlak	Kecil, untuk buku pengayaan
	Pemerintah	Kecil, untuk kelayakan penggunaan di sekolah	Mutlak untuk buku teks, kecil untuk buku pengayaan
Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran	Guru	Hampir mutlak	Kecil, untuk pengembangan dari yang ada pada buku teks
	Pemerintah Daerah	Supervisi penyusunan dan pemantauan	Supervisi pelaksanaan dan pemantauan
Pelaksanaan Pembelajaran	Guru	Mutlak	Hampir mutlak
	Pemerintah Daerah	Pemantauan kesesuaian dengan rencana [variatif]	Pemantauan kesesuaian dengan buku teks [terkendali]
Penjaminan Mutu	Pemerintah	Sulit, karena variasi terlalu besar	Mudah, karena mengarah pada pedoman yang sama

(Sumber: Kemdikbud, 2013)

Langkah Penguatan Tata Kelola

- Menyiapkan buku pegangan pembelajaran yang terdiri dari:
 - Buku pegangan siswa
 - Buku pegangan guru
- Menyiapkan guru supaya memahami pemanfaatan sumber belajar yang telah disiapkan dan sumber lain yang dapat mereka manfaatkan.
- Memperkuat peran **pendampingan** dan **pemantauan** oleh pusat dan daerah dalam pelaksanaan pembelajaran.

Komponen Kompetensi

Kompetensi Inti

- ▣ terjemahan atau operasionalisasi SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu,
- ▣ gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan (afektif, kognitif, dan psikomotor) yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata pelajaran.
- ▣ berfungsi sebagai unsur pengorganisasi (*organising element*) kompetensi dasar.

Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian *hard skills* dan *soft skills*.

KOMPETENSI DASAR

- ▣ Memuat konten /topik materi pelajaran, dan
- ▣ Kompetensi yang meliputi aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan yang bersumber kepada Kompetensi inti
- ▣ **(1) Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kelompok Mata Pelajaran Wajib,**
- ▣ **(2) Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Kelompok Peminatan Matematika dan Ilmu-ilmu Alam,**
- ▣ **(3) Kelompok Inti dan Kompetensi Dasar Peminatan Ilmu-ilmu Sosial, dan Kelompok Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa.dan Budaya**

Kompetensi Inti

Kompetensi Inti meliputi:

1. sikap keagamaan (kompetensi inti 1),
2. sikap sosial (kompetensi inti 2),
3. pengetahuan (kompetensi inti 3), dan
4. penerapan pengetahuan (kompetensi inti 4).

Keempat kelompok itu menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif.

Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung (*indirect teaching*), yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan (kompetensi kelompok 3) dan penerapan pengetahuan (kompetensi Inti kelompok 4).

Struktur Kurikulum Pendidikan Menengah

Mata Pelajaran		Kelas		
		X	XI	XII
Kelompok Wajib				
	Kelompok A			
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti	3	3	3
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	2	2	2
3	Bahasa Indonesia	4	4	4
4	Matematika	4	4	4
5	Sejarah Indonesia	2	2	2
6	Bahasa Inggris	2	2	2
	Kelompok B			
7	Seni Budaya (termasuk muatan lokal)	2	2	2
8	Prakarya dan Kewirausahaan (termasuk muatan lokal)	2	2	2
9	Pendidikan Jasmani, Olah Raga, dan Kesehatan (termasuk muatan lokal)	3	3	3
Jumlah jam pelajaran Kelompok Wajib		24	24	24
Kelompok Peminatan				
	Matapelajaran peminatan akademik (untuk SMA)	18	20	20
	Matapelajaran peminatan akademik dan vokasi (untuk SMK)	26	26	26

Struktur Kurikulum Peminatan SMA

MATA PELAJARAN			Kelas		
			X	XI	XII
Kelompok A dan B (Wajib)			24	24	24
Peminatan Matematika dan IPA					
I	1	Matematika	3	4	4
	2	Biologi	3	4	4
	3	Fisika	3	4	4
	4	Kimia	3	4	4
Peminatan Sosial					
II	1	Geografi	3	4	4
	2	Sejarah	3	4	4
	3	Sosiologi & Antropologi	3	4	4
	4	Ekonomi	3	4	4
Peminatan Bahasa					
III	1	Bahasa dan Sastra Indonesia	3	4	4
	2	Bahasa dan Sastra Inggris	3	4	4
	3	Bahasa dan Sastra Asing lainnya	3	4	4
	4	Antropologi	3	4	4
Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman					
	Pilihan Pendalaman Minat atau Lintas Minat		6	4	4
Jumlah Jam Pelajaran Yang Tersedia per minggu			60	72	72
Jumlah Jam Pelajaran Yang harus Ditempuh per minggu			42	44	44

(Sumber: Kemdikbud, 2013)

BELAJAR DARI MASA LAMPAU
UNTUK MEMBANGUN WARGA
NEGARA HANDAL DI MASA
KINI DAN MASA DEPAN

SEBUAH PESAN BIJAK:

WARGA NEGARA YANG BAIK
TIDAK DILAHIRKAN,
TAPI DICIPTAKAN... DIBENTUK
MELALUI PENDIDIKAN

GBHN	Tujuan Pendidikan Nasional	Formulasi Pendidikan Pancasila
1973 (Tap MPR RI No. IV/MPR/1973)	...untuk membentuk manusia-manusia pembangunan yang ber-Pancasila dan untuk membentuk Manusia Indonesia yang sehat jasmani dan rohaninya, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab, dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai Bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Undang-undang Dasar 1945.	... kurikulum di semua tingkat pendidikan mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Perguruan Tinggi, baik negeri maupun swasta harus berisikan Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang cukup untuk meneruskan Jiwa dan Nilai-nilai 1945 kepada Generasi Muda.
1978 (Tap MPR RI No. IV/MPR/1978)	...untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.	Pendidikan Pancasila termasuk Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah, mulai dari Taman Kanak-kanak sampai universitas, baik negeri maupun swasta.
1983 (Tap MPR RI No. II/MPR/1983)	...untuk meningkatkan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kecerdasan dan keterampilan, mempertinggi budi pekerti, memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan dan cinta tanah air , agar dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.	Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila dan unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 kepada generasi muda harus makin ditingkatkan dalam kurikulum sekolah-sekolah dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, dan di lingkungan masyarakat.
1988 (Tap MPR RI No. II/MPR/1988)	...untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. ...menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada Tanah Air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. ...menumbuhkan rasa percaya pada diri sendiri serta sikap dan perilaku yang inovatif dan kreatif. ...mewujudkan manusia-manusia pembangunan yang dapat membangun dirinya sendiri serta bersama-sama bertanggung jawab atas pembangunan bangsa.	Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), Pendidikan Moral Pancasila, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai-nilai kejuangan khususnya nilai-nilai 1945 kepada generasi muda , dilanjutkan dan makin ditingkatkan di semua jenis dan jenjang pendidikan mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta.
1993 (Tap MPR RI No. II/MPR/1993)	...untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. ...menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ke masa depan. ...menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus ditingkatkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju.	...pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan moral Pancasila, pendidikan kewarganegaraan, pendidikan sejarah perjuangan bangsa serta unsur-unsur yang dapat meneruskan dan mengembangkan jiwa, semangat dan nilai kejuangan, khususnya nilai 1945 , dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah.
1998 (Tap MPR RI No. II/MPR/1998)	...untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional, bertanggung jawab, dan produktif serta sehat jasmani dan rohani. ...menumbuhkan jiwa patriotik dan mempertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial serta kesadaran pada sejarah bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi ke masa depan. ...menumbuhkan rasa percaya diri dan budaya belajar di kalangan masyarakat terus ditingkatkan agar tumbuh sikap dan perilaku yang kreatif, inovatif, dan keinginan untuk maju.	Pendidikan Pancasila termasuk pendidikan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4), pendidikan moral Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan dilanjutkan dan ditingkatkan di semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan termasuk prasekolah sehingga terbentuk watak bangsa yang kukuh.

Kompetensi dan Materi Mapel PPKn (2013)

Kompetensi Inti (sama untuk semua mata pelajaran?)	RUANG LINGKUP MATERI
<ul style="list-style-type: none">•Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya	1. PANCASILA
<ul style="list-style-type: none">•Memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah	2. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 3. NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA
<ul style="list-style-type: none">•Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan.	4. BHINNEKA TUNGGAL IKA

ORIENTASI PKN dan Pembentukan Karakter Warga Negara Indonesia Era Global

KINI KE DEPAN:

memperkokoh identitas nasional
(Pancasila) dan tanggung jawab publik
kewargaan untuk mencapai tujuan
nasional sbgm dimuat dalam Pembukaan
UUD 1945 → POLITIK NEGARA



**Keutuhan
Karakter
WNI**

KINI dan SEKARANG:

KEHARUSAN POLITIK REZIM
untuk MENGAKTUALISASIKAN
nilai-nilai dasar Pancasila dalam
kehidupan berbangsa dan
bernegara

Penataan ulang PKn menjadi PPKn?

Pancasila sebagai dasar negara tidak direduksi dalam berbagai kebijakan (pendidikan) nasional.

Meski berganti nomenklatur PKn menjadi PPKn atau apapun namanya, Pancasila tetap harus menjadi *great ought* pembentukan warga negara yang handal bagi bangsa dan negaranya.

Memperkokoh identitas kebangsaan dan tanggung jawab kewargaan *ke dalam* sebagai warga negara Indonesia.

Memperkuat peran dan kemampuan *keluar* sebagai tanggung jawab menjadi anggota warga dunia.

Penataan ulang PKn menjadi PPKn? (lanjutan...)

Penataan PKn menjadi PPKn dalam Kurikulum Nasional jangan sekadar membubuhkan pilar-pilar kebangsaan, namun seyogianya berbasis kepentingan politik negara sebagaimana dimaksud dalam cita dan tujuan bernegara di Pembukaan UUD 1945, bukannya semata-mata bergantung kepada kepentingan politik rezim kekinian.

Perlunya objektivikasi Pancasila dalam pengembangan kajian PPKn sebagai bentuk usulan penataan PKn sekarang, dengan mengubah orientasi “mitos” dan “ideologis” ke orientasi “ilmu” (Kuntowijoyo, 1996).

Objektivikasi Pancasila dalam pembelajaran PPKn tidak sekadar mengkaji dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila sebagai *kebenaran sejarah*, tetapi menjadikan Pancasila yang fungsional dan bermakna dalam kehidupan sehari-hari.

Pekerjaan Mendatang

- Penjabaran Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar
- Sumber Belajar → Buku Pegangan Guru, Buku Pegangan Siswa, Buku “Babon”
- Dokumen Kurikulum

Profesionalisme Guru, Kultur Sekolah, Birokrasi Pendidikan, Politik Pendidikan Nasional

Terimakasih